

**JUDUL: TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
MENGENAI KEASLIAN TANDA TANGAN PARA PIHAK DALAM  
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Nama : Karina Septi Rahayu  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Pembimbing : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

PPAT dalam rangka menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman pada Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam hal pembuatan akta autentik. Seringkali dalam praktek, PPAT dalam menjalankan tugas jabatan terlibat kasus pemalsuan data para pihak salah satunya adalah tanda tangan, sehingga muncul rasa khawatir serta upaya berhati-hati. Penelitian ini menguraikan tanggung jawab PPAT mengenai keaslian tanda tangan para pihak yang menghadapnya. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila ada pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah menyampaikan data-data palsu seakan-akan asli, maka akibat hukumnya adalah jual beli tersebut batal demi hukum, jika PPAT mengetahui adanya data yang dipalsukan maka PPAT tetap bertanggung jawab sesuai kadar pelanggaran yang PPAT lakukan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Tanda Tangan, Pemalsuan**

***TITLE: RESPONSIBILITIES OF THE OFFICIALS FOR MAKING LAND  
DEEDS REGARDING THE AUTHENTICITY OF THE PARTIES'  
SIGNATURE IN THE MAKING OF LAND PURCHASE DEEDS AND ITS  
LEGAL CONSEQUENCES***

*Name* : Karina Septi Rahayu

*Study Program* : Master of Notary

*Advisor* : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

***ABSTRACT***

*PPAT in the context of carrying out the duties of his position must be guided by the Regulations for the position of Official for Making Land Deeds and other laws and regulations, especially in the case of making authentic deeds. Often in practice, the PPAT in carrying out their official duties is involved in cases of falsification of the parties' data, one of which is the signature, so that there is a feeling of worry and caution. This research outlines the PPAT's responsibilities regarding the authenticity of the signatures of the parties facing it. This research method is normative by using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study conclude that the Land Deed Making Officer is not responsible for material untruths put forward by the parties, if a party concerned in buying and selling land submits false data as if it were genuine, then the legal consequence is that the sale and purchase is null and void by law, if the PPAT knows that data has been falsified, the PPAT remains responsible according to the level of violations that the PPAT has committed.*

***Keywords: Responsibility, Signature, Forgery***